



Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan di Indonesia

Pandu Prasajo

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email: p.prasajo@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Ketika berbicara tentang konflik yang terjadi secara masif dalam skala global, tidak ada habisnya. Pemicu konflik bisa dimulai dari perbedaan pandangan, budaya, agama dan persepsi yang dapat menjadi awal mula percikan api konflik. Dalam setiap konflik, tentunya terdapat berbagai kepentingan yang mendorong terjadinya konflik. Konflik yang sering terjadi, dapat menimbulkan berbagai macam kesimpulan yang dapat mempengaruhi apa dan bagaimana sebuah hubungan dan hasil akhir dari dua individu atau lebih yang mengalami konflik. Jurnal ini berfokus pada konflik yang terjadi antara masyarakat yang bekerja di sektor informal, masyarakat yang berada di lingkaran wilayah pengembangan perusahaan dan masyarakat di daerah tertinggal. Jurnal ini juga mencoba menginterpretasikan bagaimana pola konflik dapat terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina. memahami apa, mengapa dan bagaimana konflik dapat muncul dan kemudian berkembang dari waktu ke waktu, memahami bagaimana konflik dapat menjadi pionir perubahan sosial dan bagaimana resolusi konflik terjadi. Jurnal ini menggunakan metode penulisan dengan menggunakan studi literatur yang mendalam yang berangkat dari buku-buku dan isu-isu yang muncul ke permukaan. Jurnal ini menemukan satu kesimpulan bahwa pola konflik kepentingan selalu berulang dan sering terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh bentuk-bentuk pendorong konflik dengan pola yang sama dan selalu terjadi di masyarakat, sehingga terjadi eskalasi konflik.

Kata Kunci: Konflik, Pola Konflik, Konflik Asia Selatan, Resolusi Konflik, Perubahan Sosial.

Abstract

When it comes to conflicts that occur massively on a global scale, there is no end in sight. Conflict triggers can start from differences in views, cultures, religions and perceptions that can be the beginning of conflict sparks. In every conflict, of course, there are various interests that drive the conflict. Conflicts that often occur, can lead to a variety of conclusions that can affect what and how a relationship and the end result of two or more individuals experiencing conflict. This journal focuses on conflicts that occur between people who work in the informal sector, people in the ring of a company development area and people in disadvantaged areas. This journal also tries to interpret how conflict patterns can occur in Southeast Asian regions such as Thailand and the Philippines. understanding what, why and how conflict can arise and then develop over time, understanding how conflict can be a pioneer in social change and how conflict resolution occurs. This journal uses a method of writing using in-depth literature studies that depart from books and issues that rise to the surface. This journal finds one conclusion that the pattern of conflict of interest is always repeated and often occurs in developing countries. This is due to the forms of conflict drivers with the same pattern and always occur in society, resulting in the escalation of conflict.

Keywords: Conflict, Conflict Pattern, South Asian Conflict, Conflict Resolution, Social Change.

PENDAHULUAN

Membahas mengenai konflik, tentu perlu berangkat dari satu benang merah awal sejarah terjadinya konflik di dalam masyarakat global. Konflik dibangun dari adanya bentuk-bentuk perselisihan dan juga ketegangan dari dua orang atau lebih yang tidak sepaham. (Wahyudi, 2015). Sejarah masyarakat global, terbentuk dari konflik yang berkepanjangan. Membuat kita menjadi sekarang saat ini. Perbedaan pandangan dan juga pemahaman, jika ditarik lebih jauh, sejarah awal konflik bermula dari terbunuhnya anak nabi

Adam yang bernama Habil. Habil terbunuh oleh Qabil karena bentuk kecemburuan yang dialami olehnya terhadap Habil. Hal ini menekankan teori bahwa konflik tercipta atas gesekan – gesekan yang timbul ke permukaan akibat perbedaan keinginan dan juga pemahaman.

Definisi Konflik

Roh Konflik hakikatnya berasal dari pemahaman-pemahaman yang cenderung bersifat abstrak, tidak dapat terprediksi dan bias. Akan tetapi, konflik dapat menjadi nyata dan berakibat buruk serta melahirkan bentuk – bentuk gesekan fisik antara satu atau dua individu maupun kelompok yang sedang bersitegang. Tidak bisa dipungkiri bahwa konflik menjadi salah satu warna di dalam kehidupan bermasyarakat ini sejak dahulu maupun sekarang. Warna yang hadir bisa berupa konflik besar ataupun kecil. Memahami mengenai konflik, tentu harus berangkat dari pemahaman mengenai konsep kekerasan. Konflik terjadi akibat adanya situasi ketika kehendak atau keinginan berbeda atau berseberangan antara satu sama lain. Sehingga salah satu atau keduanya mengalami perasaan terganggu Nurdjana (1994). Konflik hakikatnya muncul akibat adanya suatu perbedaan pandangan, perspektif serta argument yang tidak ada titik temu satu sama lain. Konflik juga merupakan kondisi munculnya bentuk-bentuk ketidakcocokan antara tujuan dan nilai yang ingin diperoleh di dalam diri individu, kelompok serta hubungan dengan orang lain (Thomas & Kilman, 1978). Konflik juga dapat muncul akibat dari adanya kepentingan-kepentingan yang perlu diprioritaskan diantara satu dengan lainnya. Adanya pola kegagalan di dalam penentuan titik temu, menjadi salah satu penyebab konflik terjadi. Bentuk – bentuk penyelesaian konflik pun beragam. Ada yang cepat selesai tuntas, ada yang butuh waktu lama hingga selesai maupun ada yang setengah selesai. Pemahaman konflik setengah selesai, dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan ketegangan yang sempat naik eskalasinya (Galtung, 2003). Membahas mengenai konflik, perlu memahami juga tentang mekanisme pengendalian konflik di dalam upaya penyelesaiannya. Ada beberapa langkah di dalam pengendaliannya. Pertama dengan melakukan identifikasi dan pengamatan tentang konflik secara mendalam, efisien serta adil. Kedua, bentuk penanganan konflik dengan memahami langkah-langkah penekanan atau pengurangan risiko konflik terjadi. Terakhir, upaya penyelesaian konflik dan melahirkan hasil akhir yang ideal serta menitikberatkan kepada konsep win;win solution. Di dalam upaya penanganan konflik, tentu membutuhkan skill yang terampil serta pola komunikasi yang baik tanpa melibatkan emosi agar tidak memperparah kondisi yang sudah terjadi. Konflik sejatinya bersifat merusak kedua individu atau kelompok yang sedang bertikai, sehingga mengakibatkan efisiensi produktivitas masing-masing menjadi menurun (Robbins, 2019). Membahas mengenai konflik, ada banyak sekali bentuk pengembangannya. Salah satunya adalah konflik kepentingan. Definisi dari konflik kepentingan itu sendiri adalah momen dimana seseorang yang memiliki kekuatan serta memiliki akses untuk bisa mendapatkan kekuasaan diatas kewenangan yang ia miliki, berdasarkan kepada undang-undang yang sah namun memiliki kepentingan yang didasari atas kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi bentuk kualitas dan kinerja yang seharusnya ada. Dengan kata lain, pejabat lalim yang sewenang-wenangnya. Bentuk-bentuk pola konflik kepentingan, muncul dari adanya keinginan individu atau kelompok yang ingin diprioritaskan, sehingga melupakan tanggung jawab yang semestinya dilakukan. Pola – pola yang ada di dalam konsep konflik kepentingan merupakan bentuk ketidakwajaran di dalam bentuk interaksi. Ada beberapa argument untuk menjawab fenomena ini. Konflik kepentingan di dasari oleh sikap pecundang yang menghalalkan segala cara (Anugrah, 2019). Konflik kepentingan adalah faktor keegoisan seseorang (Sulhan, 2022). Konflik kepentingan muncul sebagai proses yang dimulai ketika pihak-pihak terkait yang memiliki gagasan, datang lalu mempengaruhi seseorang.

Implikasi Konflik

1. Dampak Negatif Konflik

Konflik hakikatnya memiliki dampak yang cenderung negatif. Hilangnya kondisi damai dan bentuk ketenangan seseorang atau kelompok kemudian terganggunya aktivitas sehingga dapat menghilangkan produktivitas seseorang atau kelompok. Memahami konflik dari perspektif skeptisisme, memberikan gambaran ketakutan seseorang atau kelompok akan adanya “jalan bercabang” semua kemungkinan yang dapat terjadi jikalau konflik tidak segera terselesaikan. “Jalan bercabang” ini, melahirkan bentuk paranoid yang dialami seseorang yang berkonflik. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik memiliki hakikat yang berdampak negatif dari awal hingga akhir jika melihatnya dari perspektif pesimisme bukan optimism. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan dan manajemen konflik yang dibayangkan sehingga ada kecenderungan untuk membiarkan ketakutan-ketakutan seseorang atau kelompok yang sedang berkonflik, menjadi tumbuh subur. Keadaan seperti ini meningkatkan risiko “salah jalan” karena didasari oleh perasaan takut sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak baik. Sebagai contoh, munculnya perselisihan antara mahasiswa satu dengan lainnya dapat memicu salah satu yang sedang berkonflik, dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak didasari oleh bentuk penalaran yang sehat.

2. Dampak Positif Konflik

Terlepas dari hakikat konflik yang merupakan kondisi individu maupun kelompok yang bersitegang, konflik juga memiliki implikasi yang bisa dikatakan positif. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan dan penanganan konflik yang dilakukan secara efisien dan efektif akan memunculkan dampak positif yang ditampilkan. Konflik bisa menjadi satu momen pelepasan energi negatif yang ada di dalam tubuh (Wijono, 1993). Adanya konflik bisa menjadi moment perekatan di dalam suatu hubungan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki satu sama lain. Meskipun begitu, lebih baik berkonflik kemudian berbaikan satu sama lain dibanding tidak berkonflik kemudian hilang satu sama lain. Terlepas dari stigmatisasi konflik yang selalu dipandang negatif dan merusak ketenangan serta kedamaian satu sama lain, konflik dapat dilihat dari sisi positifnya.

Kasus Konflik Kepentingan

Bentuk - bentuk konflik kepentingan yang tercipta di dalam satu kondisi sosial masyarakat sangat beragam. Tidak jarang, kasus konflik yang terjadi justru berakibat kepada pertumpahan darah yang menimbulkan gesekan berkepanjangan. Pembahasan kasus konflik di dalam jurnal ini, berangkat dari ruang lingkup yang besar terlebih dahulu. Kasus konflik akan fokus di wilayah Asean dan bermula dari Indonesia terlebih dahulu. Jika kita mencoba untuk menarik sejarah di Indonesia, bentuk konflik yang muncul, selalu diikuti dengan kepentingan-kepentingan para pemegang kekuasaan dibaliknya (Sujud, et., al, 2022) Sebut saja salah satu konflik kepentingan yang terkenal, adalah konflik gerakan Aceh Merdeka, Konflik dengan Organisasi Papua Merdeka, Konflik Suku Madura dan Dayak di Sampit serta masih banyak lagi. Negara Thailand juga tidak terlepas dari konflik kepentingannya. Konflik yang terjadi berupa gesekan antara pribumi dengan Imigran namun dibalut dengan isu agama antara agama yang masih dirasa belum ada penyelesaiannya hingga saat ini (Ekawati, 2020). Terakhir negara Filipina yang ternyata juga memiliki permasalahan yang berkaitan dengan konflik agama. Mengapa disaat negara-negara maju memiliki fokus konflik kelompok kriminal dan konflik politik, ketiga negara tersebut masih berkuat di dalam konflik yang berkaitan dengan Sumberdaya Alam serta agama. Bagaimana kita dapat memahami kekerasan yang terjadi di Asia Tenggara dengan melihat pattern bahwa konflik kepentingan dan agama akan selalu ada dimanamana. Namun dalam konteks ini, konflik kepentingan dan agama justru lebih sering muncul di negara-negara berkembang. Penelitian ini bergerak dengan tujuan untuk mencari benang merah dan menemukan satu asumsi bahwa konflik kepentingan dan agama justru dipicu oleh pandangan yang berkembang di negara tersebut. Mengambil contoh satu bahwa Indonesia sekarang ini memiliki pandangan yang cenderung berorientasi kepada pemahaman kapitalisme dan oligarki yang berfokus kepada monopoli sumber daya di suatu wilayah tertentu untuk tujuan memperkaya golongan tertentu namun disisi lain merugikan masyarakat lokal yang sebenarnya memiliki hak atas daerah yang dimonopoli. Mencoba berangkat dari asumsi ini, monopoli melahirkan bentuk-bentuk ketidakpuasan atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh institusi resmi pemerintahan. Sehingga menimbulkan kekacauan dan jika melihat dari pendekatan radikal, daerah yang merasakan ketidakpuasan atas kebijakan yang dikeluarkan mencoba untuk melawan dengan cara yang ekstrim. Hal ini yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan ekstrimis seperti Organisasi Papua Merdeka serta Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini dengan cepat menyebar sehingga demi mengatasi konflik yang lebih panjang, Pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan pendekatan fast paced reform for peace agreement dengan pola mediasi antara kedua belah pihak. Namun untuk saat ini, ini hanya berhasil dilakukan kepada Gerakan Aceh Merdeka sedangkan bentuk mediasi untuk Organisasi Papua Merdeka masih dalam tahap pengembangan. Ada begitu banyak pandangan skeptical ketika melihat bagaimana negara-negara berkembang saat itu seperti Indonesia, Filipina dan Thailand berupaya menyelesaikan permasalahan yang berada di dalam negeri mereka. Pandangan skeptical ini kemudian berubah penggiringan narasi yang tegolong “chaotic”. Tidak hanya di Indonesia saja, Thailand dan Filipina juga memiliki permasalahan yang cenderung sama dengan asumsi diatas namun berbeda kasus. Hal yang menarik disini adalah, Thailand dan Filipina juga ikut menerapkan pendekatan fast paced reform for peace agreement namun keduanya memiliki outcome yang berbeda. Di Filipina ketika Fast paced reform dibuat, ternyata menimbulkan permasalahan sosial baru yang cenderung horizontal. Dimana muncul serangkaian pembunuhan kepada aparat negara karena muncul ketidakpuasan baru dari kelompok tertentu yang menginginkan outcome yang berbeda. Sedangkan di Thailand, outcome yang terjadi ketika fast paced reform dilakukan justru kerap menemukan kebuntuan sehingga mediasi mengalami kegagalan. Hal ini menunjukan indikasi bahwa bentuk fast paced reform kerap membuat eskalasi baru di dalam konflik yang sudah berjalan. Alasan mengapa ketiga negara ini menginginkan perdamaian yang cepat, itu karena negara-negara ini berada di dalam pengawasan World Bank di dalam program NVMS atau National Violence Monitoring Systems. Fungsi dari program ini untuk mengawasi bagaimana negara yang menjalin kerjasama dengan World bank dapat menangani konflik yang terjadi di dalam negara tersebut. Penulis berasumsi bahwa ketika negara yang menjalin kerjasama dengan World bank tidak dapat menyelesaikan konflik

dengan cepat, maka akan berpengaruh terhadap penilaian suatu negara dan akan mengurangi bentuk loan yang dikeluarkan oleh World bank.

Di dalam salah satu referensi penulisan jurnal ini menggunakan referensi dari buku disertasi Prof. Dr. Ir Rilus A Kinseng, MA yang membahas mengenai bentuk konflik yang terjadi serta bagaimana konflik tersebut bereaksi terhadap bentuk perubahan sosial pada Nelayan dan masyarakat Desa di Indonesia. Buku ini memuat pemahaman baru mengenai teori *Imagine Deprivation* dimana kondisi masyarakat yang awalnya berkecukupan, merasakan ketakutan akan hadirnya kebijakan baru yang dirasa mempengaruhi sektor perekonomian mereka. Padahal apa yang ditakutkan oleh mereka belum terjadi dan masih hanya sebatas bayangan ketakutan mereka. (Kinseng, 2022) Jurnal ini meyakini bahwa fenomena tersebut ternyata banyak dirasakan oleh para pekerja di sektor informal yakni nelayan dan petani. Mereka merasa bahwa konflik yang terjadi/akan terjadi itu didorong oleh anomali sosial yang muncul dan sangat berkaitan erat dengan konsep penghidupan, keadilan dan terakhir soal harga diri. Kembali ke isi substansi, penelitian yang dilakukan oleh Kinseng juga menjelaskan bahwa perubahan dan konflik adalah akar dari fenomena yang telah ada sejak peradaban manusia eksis. Hal ini tidak bisa terpisah dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Kita perlu memahami isu penyebab konflik itu di akar masalahnya. Mencoba untuk menarik benang merah, bahwa masalah sosial itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Namun perubahan sosial juga bisa mengakibatkan masalah sosial menjadi timbul ke permukaan. Sebagai contoh bahwa bentuk masalah sosial yang terjadi di dalam komunitas nelayan dan pedesaan seperti adanya gesekan kelas antara kelas pekerja dengan majikan. Gesekan antara si kaya dengan si miskin dapat melahirkan bentuk perubahan sosial baru seperti munculnya kebijakan – kebijakan yang pro poor sehingga dapat mengawasi dan mengendalikan tindakan dari kelas majikan agar tidak memperlakukan kelas pekerja dengan seenaknya (Kinseng, 2022). Namun disisi lain, adanya perubahan sosial dapat memicu masalah sosial baru seperti pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan struktur sosial di dalam masyarakat. Dinamika ini yang melahirkan kondisi dilemma bahwa ternyata bentuk konflik akan sulit dihindari. Tindakan-tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah meminimalisir konflik yang akan terjadi. menjelaskan mengenai bagaimana dinamika yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal. Kondisi yang terjadi saat ini, menimbulkan rangkaian dinamika yang terjadi khususnya di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri cukup unik permasalahan yang ada jika berangkat dari pemahaman antara si kaya dengan si miskin. Mereka yang masuk kedalam klasifikasi “si kaya” tentu adalah perusahaan dan pejabat negara di segala sektor. Kemudian yang masuk kedalam klasifikasi “si miskin” adalah masyarakat sebagai penerima program atau kebijakan. Indonesia saat ini, mereka yang masuk kedalam klasifikasi “si kaya” kerap menimbulkan serangkaian konflik dan banyak dari pelaku pembuat konflik berada di sektor perusahaan. Permasalahan terjadi bermula ketika perusahaan akan mendirikan wilayah operasional mereka di daerah-daerah baru. Tentu sebagai perusahaan yang berada di wilayah Indonesia, mereka akan mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Namun yang terjadi justru memicu konflik berkepanjangan. Banyak perusahaan-perusahaan menjadi bermasalah dengan menciptakan konflik di dalam masyarakat. Konflik yang paling banyak dilakukan, adalah konflik perampasan lahan. Berangkat dari permasalahan ini, penulis berasumsi bahwa telah terjadi perselingkuhan antara pihak korporat dengan Pemerintah di tingkat menengah-kebawah. Bentuk perselingkuhan adalah memanfaatkan celah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pusat dan melihat peluang ini sebagai peluang untuk memperkaya perusahaan. Tentu masyarakat yang menjadi korban dimana mereka sudah mencoba melakukan gugatan bahkan demonstrasi namun belum ada hasil yang terlihat. Hingga bentuk resolusi yang dirasa terbaik adalah bentuk mediasi. Namun ternyata outcome yang terjadi jauh dari yang diharapkan. Banyak perusahaan yang melanggar, menolak untuk melakukan mediasi dikarenakan mereka mempertanyakan netralitas pihak ketiga sebagai pihak penengah. Temuan unik lainnya adalah, banyak dari perusahaan yang bermasalah tidak berasosiasi dengan institusi seperti RSPO atau IFC.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penulisan jurnal ini, adalah metode melalui pendekatan studi literatur mendalam. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku atau majalah yang relevan dengan tujuan penelitian (Danial & Warsinah, 2008:80) studi literatur tidak serta merta membaca mengenai studi yang relevan saja. Melainkan perlu ada pembacaan data yang mendalam (Ruslan, 2008:31). Di dalam jurnal ini, berangkat dari pembahasan mengenai pola konflik yang terjadi di Indonesia dan Asean. Bagaimana memahami kekerasan yang terjadi di ASEAN, kedua pembahasan mengenai konflik yang dialami oleh kelompok-kelompok sektor informal seperti nelayan, petani dan lain-lain. dan terakhir memahami bagaimana para pemangku kepentingan seperti perusahaan dan pemerintahan di segala sektor dapat terjadi. Ketiga pembahasan tersebut dianalisis secara mendalam menggunakan teori dari Johan Galtung di dalam bukunya yang berjudul “*Searching for Peace: The Road to Transcend*” serta Meredith Hall & Robin Wagner di dalam kutipan buku dari “). *Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya*

Penyelesaiannya” penelitian karya Widayat et.,al (2021). Pola analisis dilakukan secara mendalam dengan berangkat dari pembahasan di buku yang menjadi referensi untuk mendapatkan satu kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan dimulai dari Januari sampai dengan Juli 2024. Pendekatan di dalam penulisan jurnal ini menggunakan analisis-deskriptif secara mendalam. Cakupan penulisan ini berfokus kepada fokus permasalahan yakni konflik kepentingan yang menjadi analisis mendalam dengan mengkaitkan kepada teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal ini mencoba menganalisis pattern yang muncul dari fokus penulisan diatas. Penulis membahas mengenai adanya praktik –praktik melawan hukum yang di dasari oleh adanya konflik kepentingan yang terjadi di wilayah ASEAN, kelompok Pekerja sektor informal dan para pemangku kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba memahami pola dari bentuk resolusi konflik yang terjadi di dalamnya. Pertama-tama, membedah mengenai konflik kepentingan itu sendiri. Di ASEAN, Negara Thailand dan Filipina mengalami pola konflik yang hampir bisa dikatakan sama. Konflik yang berkaitan erat dengan agama serta etnis tidak jauh dari kepentingan dari masing-masing pemeluknya. Konflik yang terjadi disini justru di dorong oleh perasaan cemburu dan merasa bahwa salah satu sudah menjadi anak emas. Sehingga melahirkan bentuk-bentuk ketakutan yang mendorong terjadinya konflik ini. Disisi lain, Indonesia juga memiliki kasus yang hampir dikatakan serupa. Namun bedanya, konflik kepentingan di Indonesia justru di latarbelakangi oleh politik yang ada. Sebagai contoh gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Papua Merdeka, semua didorong oleh keinginan untuk berkuasa atau mendapatkan sedikit kekuasaan di wilayah yang kaya akan unsur hara. Permasalahan ini tidak berhenti hanya sampai disitu saja. Tren perusahaan-perusahaan nakal yang mencoba untuk melangkahi batas-batas wajar milik warga juga kerap terjadi di Indonesia saat ini. Banyaknya permasalahan dengan pola konflik serupa, tentu menghasilkan bentuk-bentuk resolusi dengan pola yang serupa juga. Sekarang mencoba berangkat dari penjelasan analisis dari teori yang ada. Penulis mencoba melihat dari perpektif Peace Teori Johan Galtung. Johan Galtung mengatakan di dalam bukunya yang berjudul “Searching for Peace: The Road to Transcend” mendefinisikan bahwa “peace is the absence or reduction of all types of violence (Galtung,2003)” telah berusaha diimplementasikan ke dalam tindakan yang disebut Fast Paced Reform for peace Agreement. Dimana bentuk mediasi, negosiasi melalui jalur musyawarah dan jalur hukum segera dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan konflik yang terjadi. Perspektif ini menguatkan konsep mengenai Positive Peace yang berhasil dilakukan sehingga berhasil menghilangkan bentuk-bentuk konflik yang sudah terjadi selama beberapa tahun seperti konflik GAM di Aceh dan Konflik dengan perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia. Membahas mengenai Fast Paced Reform for peace Agreement yang dilakukan oleh beberapa negara. Louis Kriesberg berteori bahwa “Within every society, however, many other ways of settling fights have long been practiced, including various forms of mediation or adjudication. Even between opposing societies, negotiations have been used throughout history to reach agreements regarding issues of contention between them” (Kriesberg,2009). Ini menjelaskan bahwa di dalam proses menciptakan Fast Paced Reform for peace Agreement yang sesuai, membutuhkan langkah praktis seperti mediasi dan proses untuk menemukan konklusi win:win solution di dalam pihak yang berseteru. Selain itu, Louis Kriesberg mengatakan bahwa “The CR (Conflict Resolution) field is likely to increase in size and societal penetration in the future (Kriesberg,2009)”. Teori ini menjadi validasi tindakan Fast Paced Reform yang dilakukan oleh negara-negara yang mengalami konflik seperti Indonesia, Filipina dan Thailand bahwa tindakan ini merupakan pilihan yang sesuai untuk saat ini mengingat bentuk penyelesaian konflik akan terus berkembang kedepannya. Bentuk Inovasi di dalam Fast Paced Reform adalah percepatan untuk mencapai damai dan menghentikan konflik yang berisiko panjang.

Kembali ke perspektif peace teori, Johan Galtung mengkategorikan penyebab konflik menjadi tiga definisi:

- a. *Trigger causes*
- b. *Proximate Causes*
- c. *Root Causes*

Ketiga definisi yang diutarakan oleh Johan Galtung menjadi faktor penjelas bahwa konflik dapat terjadi dengan melihat asal muasal konflik yang terjadi. Permasalahan yang muncul di dalam ketiga buku diatas melihat bahwa konflik yang terjadi di Asia Tenggara, berasal dari pemahaman bahwa kondisi pemerintah saat itu sudah disusupi oleh sistem kapitalisme yang cenderung mendorong konsep oligarkisme yang ada di dalam diri Pemerintah. Seperti duri dalam daging, muncul berbagai macam ketidakpuasan atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah seperti yang tertuang di dalam buku “Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Pedesaan di Indonesia” dan “Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia”. Bentuk-bentuk kebijakan yang dirasakan tidak pro poor ditambah banyaknya

kepentingan kepentingan yang ada sehingga merugikan masyarakat asli daerah, membuat konflik yang terjadi di Asia Tenggara muncul dan berkembang kala itu. Teori Imagine Deprivation menjelaskan berbagai macam efek samping yang terjadi dari pemikiran ketakutan masyarakat akan jatuh miskin. Namun membahas mengenai masyarakat desa dan kelompok nelayan, mereka tidak lagi sendiri. Ada banyak bentuk-bentuk Community Social Responsibility yang bisa mereka dapat incase kebijakan yang tidak pro poor sudah menjadi kebijakan yang diimplementasikan ke dalam masyarakat Indonesia.

Meredith Hall & Robin Wagner di dalam bukunya yang berjudul “Resolution of Social Conflict” mempunyai lima pandangan analisis yang berbeda untuk upaya di dalam menyelesaikan konflik. Meredith Hall & Robin Wagner menyebutkan bahwa langkah awal analisis adalah dengan memahami sejauh mana resolusi ingin dicapai, kedua memahami langkah awal dari perbedaan pola utama, ketiga memastikan siapa, bagaimana dan konsekuensi dari konflik yang sedang terjadi, keempat memastikan seberapa dalam resolusi yang ditawarkan dan terakhir memahami konsep struktur kekuatan sosial di dalam penanganan resolusi konfliknya. Meredith Hall & Robin Wagner menjelaskan bahwa upaya penyelesaian resolusi konflik memerlukan kajian mendalam dengan memahami berbagai macam langkah strategis yang memiliki risiko minim dan tanpa menimbulkan eskalasi baru di dalam konflik yang pernah terjadi. Teori ini mendukung bentuk-bentuk penyelesaian konflik kepentingan yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan besar di wilayah negara Indonesia. Fokus penyelesaian konflik memerlukan pemahaman yang ekstra demi menghindari permasalahan baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan satu kesimpulan menarik bahwa bentuk pola konflik kepentingan selalu memunculkan pola resolusi konflik yang polanya juga sama. Namun yang menjadi temuan unik, bentuk konflik kepentingan kerap menjadi satu konflik besar dan kerap terjadi negara-negara berkembang dan itu selalu berulang. Hal ini disebabkan oleh bentuk-bentuk pendorong konflik dengan pola yang selalu sama dan terjadi di dalam masyarakat. Seperti pendorong konflik yang berasal dari kondisi imajiner individu atau kelompok, yang membayangkan bentuk-bentuk ketakutan yang akan terjadi kedepannya, namun belum terjadi saat ini. Kondisi imajiner ini kemudian direalisasikan oleh masyarakat yang membayangkan sebagai bentuk dari self defend mechanism dengan tujuan sebagai upaya pencegahan. Namun yang ada justru tindakan-tindakan blunder dan melahirkan konflik baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Seperti yang sudah dianalisis diatas, pola konflik kepentingan hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan perdamaian positif sehingga berakibat kepada hilangnya eskalasi konflik yang terjadi. Namun sayangnya, hanya sedikit dari peran baik itu Pemerintah maupun Perusahaan yang memahami apa itu perdamaian positif. Banyak dari bentuk resolusi konflik yang berakhir dengan perdamaian negatif dengan menerapkan metode Fast Paced Reform for peace Agreement, memunculkan perdamaian negatif yang memiliki peluang konflik bereskalasi kembali dan dapat berakibat kepada risiko kemunculan konflik baru yang jauh berbeda dari konflik – konflik sebelumnya. Hal ini penulis coba maknai sebagai analogi “ menutup gerbang menggunakan kunci rapuh”. Akan ada masanya dimana bentuk perdamaian negatif tetap dipertahankan, akan keluar sebagai satu ledakan besar yang menimbulkan mara bahaya. Sayangnya, hal ini sudah terjadi di dalam kasus perang smpit. Bentuk perdamaian yang selalu berangkat dari metode Fast Paced Reform for peace Agreement, dapat menimbulkan risiko konflik dengan skala yang jauh lebih besar lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Vacas, E. C., & Rodríguez-Ruiz, B. (2023). How do teachers and students deal with conflict?: An analysis of conflict resolution strategies and goals. *Revista de Investigación Educativa*, 41(2), 551-572.
- Kiseng, A. (2022). *Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Pedesaan di Indonesia*. IPB Bogor Disertation
- Prihati, A., & Khabibah, N. A. (2022). Studi Literatur: Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20(2), 125-135.
- Widayat, I. A., Bahari, D. M., Salsabila, A. A., Handayani, N. R. S., & Adjie, H. K. (2021). Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya Penyelesaiannya. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1-9.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen konflik dan resolusi Konflik: sebuah pendekatan terhadap perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16-34.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*. Cv. Azka Pustaka.
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 172-185.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51-65.

- Kobesi, P., Kinseng, R. A., & Sunito, S. (2019). Kelas dan potensi konflik nelayan di kota kupang (studi kasus nelayan di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 157-170.
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyarningsih, D. I., ... & Suradiredja, D. Y. (2022). The oil palm governance: challenges of sustainability policy in Indonesia. *Sustainability*, 14(3), 1820.
- Kinseng, R. A., Buchori, D., Alatas, H., Tarigan, S. D., Zamani, N. P., Digdo, A. A., ... & Mahmud, A. (2023, July). Natural resource-based social conflict and principles of sustainable landscape approach: case study of kelola sendang project, South Sumatera, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1220, No. 1, p. 012035). IOP Publishing.
- Garfield, Z. H. (2021). Correlates of conflict resolution across cultures. *Evolutionary Human Sciences*, 3, e45.
- Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2021). Managing emotions during team problem solving: Emotional intelligence and conflict resolution. In *Emotion and performance* (pp. 195-218). CRC Press.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 277.
- Tuhuteru, L. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik. Cv. Azka Pustaka.
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review [the Essence of Religion in Social Conflict At Poso Regency Using the Theory of Karl Marx: A Literature Review]. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15-28.
- Mustaqim, A., & Baratullah, B. M. (2020). Moderasi Beragama Sebagai Paradigma Resolusi Konflik.
- Jondar, A., Widodo, A. P., de Fretes, J., Hakim, L., Susanto, S., & Sujud, M. (2022). JOHAN GALTUNG'S CONCEPT OF PEACE CULTURE AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 6(2), 230-252.
- Basuki, E., & Balak, K. (2023). Konflik Masyarakat Desa Pulauw Dan Kariuw Di Maluku. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL)*, 1, 359-374.
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Perspektif Kearifan Lokal dalam Tata Kelola dan Penyelesaian Konflik Keagamaan di Madura; Sebuah Tinjauan Sosiologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(2), 163-179.
- Ekawati, D. (2020). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim Thailand. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 15(1), 51-79.
- Pattipeilhy, S. C. H. (2021). Perdamaian Negatif dalam Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Suriah 2011-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 188-206.